

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Informan Penelitian**

Dalam penelitian mengenai keterlibatan warga dalam manajemen anggaran desa, terutama di Desa Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, profil narasumber memiliki peran krusial. Narasumber yang dipilih adalah individu yang mampu memberikan perspektif dan opini terkait topik penelitian. Untuk mendapatkan penilaian yang komprehensif, peneliti memilih beberapa pihak sebagai narasumber, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Pendamping Desa, serta anggota masyarakat. Informasi yang terkumpul kemudian diproses untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan terinci dari setiap aspek yang ditanyakan. Hal ini memudahkan proses analisis kualitatif terhadap data tersebut.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang profil narasumber, peneliti mengelompokkan mereka berdasarkan beberapa kriteria, yaitu inisial nama, usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan profesi. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyajikan identitas narasumber secara lebih terstruktur dan informatif. Selanjutnya, akan dipaparkan secara lebih rinci mengenai deskripsi identitas para narasumber dalam penelitian ini.

**Tabel 5. 1 Profil Informan**

<b>Nama Informan</b>	<b>Usia</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan</b>
Rukminto Ari Prastowo	54 Tahun	SMA	L	Kepala Desa
Yayan Rohyana	46 Tahun	SMA	L	Sekretaris Desa
Cecep Herawan	46 Tahun	SMA	L	Ketua BPD
Muhasim	51 Tahun	SMA	L	Pendamping Desa
Ansori Hidayat	33 Tahun	S2	L	Masyarakat
Supriyono	37 Tahun	S2	L	Masyarakat
Lilis	42 Tahun	SMA	P	Masyarakat
Sulistyowati	29 Tahun	S1	P	Masyarakat
Alam	25 Tahun	SMA	L	Masyarakat

## 5.2 Deskripsi Hasil

Pada bab ini, peneliti menyajikan gambaran hasil penelitian tentang “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Perangkat Desa di Desa Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo”. Data penelitian diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk kegiatan musyawarah desa, pelaksanaan proyek, dan pengawasan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder seperti laporan keuangan desa, peraturan desa, dan dokumen terkait pengelolaan Dana Desa. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa, meliputi:

1. Kepala Desa Cilodang (Rukminto Ari Prastowo)
2. Sekretaris Desa Cilodang (Yayan Rohyana)
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Cecep Herawan)
4. Pendamping Desa (Muhasim)
5. Masyarakat Desa Cilodang (Ansori Hidayat)

Setelah data terkumpul dan diolah melalui analisis dokumen, wawancara mendalam dengan informan, serta pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan Dana Desa, peneliti mendapatkan temuan tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Cilodang. Hasil penelitian ini mencakup deskripsi partisipasi masyarakat pada setiap tahap pengelolaan Dana Desa, faktor pendukung dan penghambat partisipasi, serta kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di Desa Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terlihat cukup signifikan. Partisipasi ini tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah suatu proses yang membutuhkan peran aktif warga dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

Keterlibatan ini tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia, sehingga memastikan inklusivitas dalam pembangunan desa. Sebagaimana dikemukakan oleh A. Hidayat (2014), partisipasi masyarakat dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan agar lebih efektif dan efisien.

Di Desa Cilodang, implementasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dilakukan melalui enam tahapan yang terstruktur. Setiap tahap dirancang untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki kesempatan untuk terlibat secara penuh. Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya berjalan secara transparan tetapi juga responsif terhadap kebutuhan seluruh warga.

### **1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana Desa**

Masyarakat Desa Cilodang terlibat aktif dalam perencanaan penggunaan dana desa melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan warga setempat. Melalui forum ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat serta kebutuhan mereka terkait pembangunan desa. Proses musyawarah memungkinkan warga memberikan masukan guna menetapkan skala prioritas program yang akan dibiayai oleh dana desa.

Selain itu, peran BPD dan Pendamping Lokal Desa sangat penting dalam memastikan inklusivitas proses perencanaan, sehingga kelompok yang biasanya kurang aktif dalam forum publik tetap dapat berpartisipasi dan menyampaikan aspirasinya. Dengan demikian, musyawarah desa menjadi sarana yang efektif untuk menampung berbagai suara masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa.

“Kami masyarakat biasanya diajak rapat musyawarah dusun. Di situ kami kasih masukan, apa yang perlu dibangun. Jalan lingkungan, drainase, atau apa

yang menurut kami paling penting.”ujar Ansori selaku Masyarakat Desa Cilodang

Partisipasi warga dalam proses perencanaan memiliki peran krusial untuk menjamin bahwa program dan kegiatan yang dirancang benar-benar selaras dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam tahap perencanaan juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan kesadaran akan tanggung jawab bersama terhadap pelaksanaan program pembangunan tersebut. Dengan demikian, proses perencanaan yang partisipatif tidak hanya memperkuat relevansi program, tetapi juga mendorong komitmen kolektif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami dari BPD hadir untuk memastikan masyarakat bisa bicara. Kalau usulan bagus dan sesuai kebutuhan, kami dukung penuh.”ujar Cecep Herawan selaku Ketua BPD Cilodang

Proses perencanaan dana desa di Desa Cilodang diawali dengan musyawarah tingkat dusun yang mengikutsertakan berbagai pihak, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, pengurus RT, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Kepala Desa menegaskan bahwa forum musyawarah ini memegang peranan krusial sebagai tahap awal dalam menampung berbagai aspirasi dan keperluan warga. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberi ruang untuk secara aktif mengemukakan gagasan, masukan, serta harapan mereka mengenai pembangunan desa.

Pendamping Lokal Desa (PLD) membantu menjelaskan prosedur dan memastikan semua pihak memahami proses perencanaan.

“Kami fasilitasi agar masyarakat paham, kadang mereka bingung prosedur. Jadi kami bantu jelaskan aturan dan cara penyampaian usulan.” Ujar Muhasim selaku Pendamping Lokal Desa (PLD)

Masukan yang terkumpul dari musyawarah kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) sebagai acuan dalam menetapkan skala prioritas pembangunan desa. Kepala Desa menyatakan bahwa partisipasi aktif

masyarakat dalam proses perencanaan merupakan faktor penting untuk menjamin keselarasan antara program yang akan dilaksanakan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan benar-benar mencerminkan keinginan dan kepentingan warga desa.

“Sejak tahap perencanaan, kami telah mengikutsertakan warga melalui forum musyawarah dusun. Hal ini kami anggap penting untuk memastikan setiap program yang dirancang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Rukminto dalam sebagai Kepala Desa.

Selain itu, Kepala Desa juga menjelaskan bahwa perencanaan yang baik akan memudahkan proses pengawasan dan evaluasi di kemudian hari. Hasil wawancara dengan Kepala Desa mengungkapkan bahwa mekanisme partisipasi warga dalam perencanaan dana desa diawali melalui forum musyawarah dusun. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk BPD, perangkat desa, pengurus RT, dan tokoh-tokoh lokal. Fungsi utama musyawarah ini adalah sebagai sarana penggalian aspirasi masyarakat yang hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKP. Kepala Desa menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan demi terwujudnya program pembangunan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan warga.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana penggunaan Dana Desa di Desa Cilodang merupakan faktor kunci untuk memastikan program pembangunan yang tepat sasaran. Forum musyawarah desa berfungsi sebagai sarana kolaboratif yang menghimpun masukan dari berbagai unsur seperti BPD, perangkat desa, dan warga biasa, sehingga menghasilkan perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan komunitas.

Dalam forum ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan terkait prioritas pembangunan yang akan dibiayai. Salah seorang warga, Ansori, menuturkan bahwa mereka sering mengajukan usulan pembangunan, seperti perbaikan jalan lingkungan dan drainase, saat musyawarah dusun dilaksanakan.

“Kami mengadakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) setiap tahun untuk menampung aspirasi warga. Namun, partisipasi masih didominasi oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Ada tantangan dalam menyederhanakan bahasa teknis agar mudah dipahami warga.”Ujar Rukminto selaku Kepala Desa

Berdasarkan penjelasan Kepala Desa Rukminto, penyusunan rencana penggunaan Dana Desa diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang. Forum perencanaan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat desa, anggota BPD, hingga tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili kepentingan warga. Namun, ia mengakui bahwa partisipasi warga biasa masih rendah karena minimnya sosialisasi dan dominasi elit desa dalam pengambilan keputusan. Sekretaris Desa Yayan menambahkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengumpulkan aspirasi melalui forum RT/RW, banyak usulan warga yang tidak masuk dalam prioritas anggaran karena keterbatasan dana.

Dukungan pendamping desa dalam proses perencanaan sangat membantu dalam menjelaskan mekanisme dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang aktif, turut berpartisipasi. Kepala Desa Rukminto menegaskan bahwa melibatkan warga sejak awal perencanaan sangat krusial agar program yang dibuat benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka. "Kami mengajak masyarakat berdiskusi sejak tahap awal melalui musyawarah dusun," jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi warga bukan sekadar kehadiran, tetapi juga mencakup proses mendengarkan dan menyerap aspirasi mereka.

Pemerintah Desa telah berupaya menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa melalui beragam media seperti pertemuan desa, papan informasi, dan platform digital WhatsApp. Namun demikian, banyak anggota masyarakat yang menyatakan bahwa penjelasan yang diberikan belum memadai dan dirasa kurang komprehensif dalam memaparkan rincian penggunaan anggaran. Beberapa mengeluhkan bahwa laporan terlalu teknis dan sulit dipahami, bahkan seringkali hanya berisi ringkasan tanpa penjelasan rinci mengenai alokasi dan realisasi dana. Sebagai bagian dari masyarakat, mereka menyadari pentingnya transparansi yang nyata, di mana warga

dapat mengakses informasi secara terbuka dan lengkap untuk benar-benar memahami pengelolaan Dana Desa.

Meski ada mekanisme pengawasan melalui BPD dan musyawarah, hambatan komunikasi sering membuat proses ini kurang efektif. Banyak warga yang masih bingung cara menyampaikan masukan atau keluhan, serta khawatir dengan tanggapan dari perangkat desa. Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah desa dapat memperbaiki saluran komunikasi dan memberikan pelatihan agar masyarakat lebih paham tentang tata kelola Dana Desa. Dengan demikian, partisipasi warga tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi proses kolaboratif yang bermanfaat bagi semua pihak.

Transparansi dalam pelaporan penggunaan Dana Desa juga menjadi harapan besar masyarakat. Sejumlah warga menginginkan laporan yang lebih rinci, termasuk penggunaan dana untuk infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi. Mereka memahami bahwa transparansi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga harus memungkinkan warga untuk mengerti dan mengawasi penggunaannya. Hal ini penting agar masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam mengontrol Dana Desa, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah desa meningkat dan pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

“Saya pernah hadir di Musrenbang, tetapi prosesnya terkesan formalitas. Aspirasi warga biasa sering kurang didengar. Perlu sosialisasi lebih intensif agar lebih banyak warga terlibat.”Ujar Ansori Selaku Masyarakat

Dari sisi masyarakat, Ansori Hidayat mengungkapkan bahwa Musrenbang sering dianggap sebagai formalitas belaka. Kami diundang, tapi ketika menyampaikan usulan pembangunan jalan di RT kami, jawabannya selalu akan dibahas Tahun berikutnya, jalan itu tetap tidak jadi, keluhnya. Lilis, seorang ibu rumah tangga, merasa bahwa suara perempuan jarang didengar dalam perencanaan. Kami butuh pelatihan ekonomi, tapi yang selalu diprioritaskan itu infrastruktur, ujarnya. Pendamping Desa Muhasim menegaskan bahwa tantangan utama adalah

kurangnya kapasitas masyarakat memahami mekanisme perencanaan, sehingga perlu pendampingan lebih intensif.

## **2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Dana Desa**

Pada tahap pelaksanaan program, masyarakat Desa Cilodang berperan serta secara langsung dalam merealisasikan rencana pembangunan yang telah disusun. Bentuk partisipasi yang menonjol adalah dengan memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja dari kalangan masyarakat setempat untuk berbagai proyek pembangunan. Pendekatan ini memberikan keuntungan ganda, yaitu meningkatkan pendapatan warga sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap pembangunan desa.

Pengelolaan dana desa di Desa Cilodang tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pelibatan aktif warga sebagai tenaga kerja dalam berbagai proyek. Kebijakan ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk transparansi, setiap pelaksanaan proyek dilakukan secara terbuka dengan menyediakan informasi lengkap mengenai jadwal pelaksanaan dan alokasi anggaran melalui papan pengumuman desa, sehingga memungkinkan warga untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pembangunan dan penggunaan dana.

“Papan proyek itu ditaruh dekat jalan. Jadi kita bisa lihat jadwalnya, biayanya, siapa pelaksana, semua ada.” ujar Ansori selaku Masyarakat Desa Cilodang

Dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan proyek, pihak desa memasang papan pengumuman yang memuat informasi lengkap tentang timeline pelaksanaan dan spesifikasi pekerjaan. Melalui mekanisme ini, masyarakat tidak hanya dapat memonitor kemajuan pembangunan, tetapi juga berkesempatan untuk memberikan feedback atau masukan konstruktif ketika dibutuhkan.

Tahap implementasi pembangunan di Desa Cilodang menunjukkan partisipasi nyata masyarakat melalui kontribusi mereka dalam proyek-proyek dana desa. Sekretaris Desa menyatakan bahwa warga dilibatkan sebagai tenaga kerja

dalam pembangunan berbagai infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas sanitasi. Pendekatan ini memberikan manfaat ganda: menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap proyek-proyek yang dibangun.

“Kami selalu memberikan prioritas pada tenaga kerja lokal dalam setiap proyek pembangunan,” ungkap Yayan Rohyana selaku Sekretaris Desa.

Menurutnya, pendekatan ini memiliki dua manfaat sekaligus: membuka peluang pekerjaan bagi warga dan sekaligus memperkuat keterikatan masyarakat dengan hasil pembangunan di desa mereka. Tidak hanya sebagai tenaga kerja, warga desa juga turut berpartisipasi dalam menyediakan material lokal yang diperlukan untuk berbagai proyek pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam penyediaan bahan bangunan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran sekaligus menjamin kemanfaatan proyek bagi kepentingan bersama. Dengan pendekatan ini, penggunaan dana desa diharapkan dapat lebih optimal dan hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat..

Menurut penjelasan Sekretaris Desa, keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program dana desa tercermin dari partisipasi mereka dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Warga turut serta dalam pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang merupakan sarana publik untuk kebutuhan sanitasi sehari-hari. Dengan melibatkan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang telah dikerjakan bersama.

Secara umum, implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Cilodang telah menunjukkan perkembangan yang positif dan berjalan dengan efektif. Berbagai program dan kegiatan yang didanai melalui anggaran desa tersebut telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah desa telah menjalankan berbagai program dengan melibatkan masyarakat secara aktif, misalnya dengan mempekerjakan warga dalam proyek

pembangunan serta memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk efisiensi. Selain itu, pemasangan papan informasi di tempat umum memungkinkan warga melihat langsung jadwal kegiatan, besaran anggaran, dan pihak pelaksana. Upaya ini menunjukkan peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, meskipun masih perlu ditingkatkan lagi agar warga semakin paham dan dapat terlibat dalam pengawasan penggunaan dana.

“Masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proyek fisik, seperti pembangunan jalan. Ada kendala dalam pendataan kelompok sasaran program pemberdayaan.” Ujar Yayan Rohyana Selaku Sekretaris Desa

Ketua BPD Cecep Herawan menjelaskan bahwa masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proyek fisik, seperti pembangunan jalan atau saluran air. Namun, ia mengkritik tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan. Yang dapat pekerjaan seringnya orang-orang dekat perangkat desa, ucapnya. Supriyono, seorang warga, membenarkan hal ini. Saya tidak pernah dapat info lowongan kerja dari proyek desa. Tiba-tiba proyek sudah jalan dan dikerjakan oleh orang tertentu saja," katanya.

“Saya ikut pelatihan kerajinan tangan dari Dana Desa, tetapi tidak ada pendampingan lanjutan.” Ujar Lilis Selaku Masyarakat

Di sisi lain, Sulistyowati menceritakan pengalamannya mengikuti pelatihan pembuatan kerajinan tangan yang didanai Dana Desa. Pelatihannya bagus, tapi setelah selesai tidak ada pendampingan. Kami bingung mau menjual produknya ke mana, keluhnya. Alam, petani kecil, menambahkan bahwa program bantuan bibit pertanian tidak merata. Yang dapat selalu kelompok tani tertentu, padahal kami juga butuh, ujarnya.

Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa melalui berbagai media, mulai dari forum musyawarah desa, papan informasi, hingga platform digital seperti media sosial dan grup WhatsApp. Namun, sebagian besar masyarakat mengeluhkan bahwa format laporan yang ada saat ini masih terlalu rumit dan sulit dimengerti oleh warga biasa. Untuk meningkatkan transparansi dan

partisipasi masyarakat, ke depan perlu dilakukan penyederhanaan bahasa dalam laporan serta dilengkapi dengan infografis atau dokumentasi foto yang lebih visual, sehingga memudahkan seluruh lapisan masyarakat dalam memahami dan mengawasi penggunaan anggaran desa.

Partisipasi warga dalam pengawasan dan perencanaan program juga masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dan masih ragu menyampaikan aspirasi karena belum adanya mekanisme pengaduan dan forum diskusi yang benar-benar terbuka dan responsif. Untuk itu, diperlukan pelatihan atau sosialisasi agar warga lebih memahami peran mereka dan dapat berkontribusi secara lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa.

Masyarakat telah menikmati berbagai manfaat nyata dari pengelolaan Dana Desa, terutama dalam perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan sistem drainase, serta bantuan sosial bagi keluarga prasejahtera. Namun demikian, distribusi manfaat ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Untuk itu, diperlukan penguatan program-program pemberdayaan ekonomi yang bersifat berkelanjutan, agar dapat memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan bagi kesejahteraan warga secara keseluruhan.

Secara esensial, Desa Cilodang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan pembangunan dan mengelola dana desa secara optimal. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas komunikasi, serta membangun kepercayaan masyarakat guna menciptakan sistem pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan dan inklusif. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Penatausahaan Dana Desa**

Proses penatausahaan dana desa di Cilodang mencakup sistem administrasi dan pembukuan yang dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui mekanisme pengawasan terhadap aliran keuangan desa. Setiap penggunaan anggaran dicatat secara detail oleh pemerintah desa dan dibuat tersedia bagi warga, menjamin keterbukaan informasi keuangan desa.

Masyarakat turut berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui berbagai forum diskusi yang secara khusus membahas pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Dalam musyawarah-musyawarah ini, warga diberikan kesempatan untuk mengevaluasi laporan keuangan sekaligus menyampaikan masukan terkait pengelolaan dana desa. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bagaimana dana desa digunakan dan memberikan masukan untuk perbaikan.

Administrasi pengelolaan dana desa dilakukan dengan menjaga prinsip transparansi agar masyarakat dapat mengakses dan memahami informasi terkait penggunaan dana. Dokumen keuangan tersedia secara terbuka, dan warga diberi kesempatan untuk memantau serta mengevaluasi setiap perkembangan melalui forum desa atau papan pengumuman yang mudah dijangkau. Proses administrasi dan pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparan. Dokumen keuangan dapat diakses melalui musyawarah dan papan informasi.

“Kalau ada laporan keuangan, kita bisa lihat di papan pengumuman. Kadang juga disampaikan waktu musyawarah desa.” Ujar Ansori selaku masyarakat

Menurut penjelasan Ketua BPD, meskipun Badan Permusyawaratan Desa tidak secara langsung mengurus administrasi keuangan desa, mereka memiliki peran penting dalam memastikan proses pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi pengawasan BPD mencakup pemantauan terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran, termasuk verifikasi bahwa penggunaan dana sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan melalui forum musyawarah desa.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua BPD, Cecep Herawan menyatakan bahwa pihaknya secara aktif mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa agar selalu sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat.

“Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan implementasi yang tepat, baik dari sisi administratif maupun substansi pemanfaatan dana untuk kepentingan publik,” ujarnya.

BPD juga berperan aktif dalam memastikan seluruh transaksi keuangan desa terdokumentasi secara rapi dan dilaporkan secara periodik. Langkah ini merupakan upaya penting untuk memelihara prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Lebih lanjut, Ketua BPD menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses administrasi keuangan diwujudkan melalui forum musyawarah, yang memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasi mengenai alokasi dana desa.

Ketua BPD menegaskan bahwa peran lembaganya lebih bersifat pengawasan daripada pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa. Mereka secara aktif memonitor implementasi program untuk menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap rencana anggaran yang telah disepakati bersama melalui proses musyawarah sebelumnya.

Prinsip utama pengelolaan Dana Desa harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Hal ini bertujuan agar dana dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik, bukan hanya sekadar memenuhi formalitas administrasi. Seperti ditekankan oleh Ansori dan Cecep, meski Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berperan langsung dalam pengelolaan keuangan, mereka memiliki kewajiban untuk memastikan alokasi dana sesuai dengan regulasi dan aspirasi masyarakat, termasuk melakukan pemantauan rutin terhadap transaksi dan laporan keuangan desa.

Sebagai warga, informasi mengenai Dana Desa biasanya diperoleh melalui berbagai saluran seperti papan pengumuman, musyawarah desa, atau grup WhatsApp. Namun, seringkali informasi yang disampaikan masih terlalu umum dan sulit dipahami, terutama karena penggunaan istilah teknis dalam laporan. Di sisi lain, masih terdapat kendala dalam hal partisipasi warga yang belum optimal, baik dalam tahap pengawasan maupun perencanaan. Kondisi ini berdampak pada belum tercapainya tingkat transparansi dan partisipasi yang ideal dalam pengelolaan anggaran desa.

“Laporan keuangan dipajang di balai desa dan dibahas dalam musyawarah, tetapi minim partisipasi warga dalam pengawasan. BPD kesulitan memastikan akurasi laporan karena keterbatasan kapasitas.” Ujar Cecep Herawan selaku Ketua BPD

Kepala Desa Rukminto menyatakan bahwa laporan keuangan dipajang di balai desa dan dibahas dalam musyawarah. Namun, Cecep Herawan (BPD) mengakui bahwa pengawasan masyarakat lemah karena laporan sulit dipahami. Ada tabel-tabel dengan istilah teknis seperti realisasi anggaran dan sisa dana yang menganggur. Warga biasa mana paham? ujarnya. Masyarakat seperti Ansori mengaku hanya melihat papan pengumuman berisi tulisan kecil yang tidak terbaca. Kalau tidak datang ke balai desa, kami tidak tahu ada laporan, katanya.

“Laporan terlalu teknis. Saya tidak paham istilah seperti 'realisasi anggaran.’” Ujar Lilis selaku masyarakat

Muhasim (Pendamping Desa) mengungkapkan bahwa kotak pengaduan di kantor desa jarang digunakan karena warga takut dianggap menghina pemerintah desa. Mereka khawatir di-blacklist dari program bantuan, jelasnya. Lilis membenarkan: Pernah ada tetangga yang protes soal ketidakmerataan bantuan, eh malah dikucilkan dalam pembagian berikutnya.

Ke depannya, diharapkan tata kelola Dana Desa dapat berjalan dengan lebih transparan, di mana informasi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif warga juga perlu ditingkatkan dalam setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak. Diperlukan juga mekanisme pengawasan yang jelas dan responsif, serta laporan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilengkapi dengan visualisasi seperti foto atau infografis untuk memudahkan pemahaman warga.

Meskipun beberapa manfaat sudah terlihat, seperti perbaikan jalan desa, bantuan sosial, dan pelatihan UMKM, masih ada ketimpangan dalam distribusi

manfaat, di mana sebagian warga merasa belum merasakan dampaknya secara merata. Oleh karena itu, ke depan, Dana Desa sebaiknya lebih difokuskan pada peningkatan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah desa perlu menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan laporan tanpa khawatir dianggap terlalu ikut campur. Keterlibatan aktif warga merupakan faktor penting guna memastikan alokasi dana benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. Dengan memperkuat aspek transparansi, kolaborasi, dan sistem pengawasan kolektif, diharapkan dapat tercipta kemajuan pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan.

Pada intinya, pengelolaan Dana Desa ke depan diharapkan mampu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip integritas yang kuat, melibatkan partisipasi menyeluruh dari berbagai unsur masyarakat, serta menghasilkan dampak positif yang dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh warga desa.

#### **4. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Dana Desa**

Proses pelaporan penggunaan dana desa menjadi tahapan krusial dalam tata kelola keuangan desa guna menjamin prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban. Di Desa Cilodang, warga dilibatkan secara aktif dalam mekanisme pelaporan melalui forum evaluasi triwulanan. Pada kesempatan tersebut, pemerintah desa mempresentasikan laporan realisasi anggaran sekaligus membuka ruang dialog untuk menerima berbagai masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Dalam menyampaikan laporan keuangan, pemerintah desa rutin mengadakan rapat bersama masyarakat, biasanya setiap tiga bulan sekali. Forum ini memberikan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi program yang telah berjalan. Masyarakat juga memiliki hak untuk bertanya dan mengkritisi jika ada hal yang dianggap tidak sesuai, menunjukkan transparansi yang aktif dalam

proses pelaporan. Pemerintah desa menyampaikan laporan secara terbuka kepada masyarakat setiap triwulan, biasanya melalui pertemuan desa.

“Pak kades biasanya laporan ke kami pas rapat, kami diberi tahu uangnya dipakai untuk apa, dan proyek sudah sampai mana.” ujar Ansori selaku Masyarakat Desa Cilodang

Keterlibatan warga dalam proses pertanggungjawaban dana desa juga diwujudkan melalui mekanisme pengawasan aktif terhadap laporan yang disampaikan pemerintah desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengevaluasi dan memberikan koreksi apabila menemukan adanya ketidakakuratan atau penyimpangan dalam dokumen laporan tersebut.

BPD ikut mengawasi proses pelaporan, dan masyarakat diberi ruang untuk memberi tanggapan.

“Kalau ada yang tidak sesuai, warga bisa tanya langsung saat rapat. Itu sudah biasa.” Ujar Cecep Herawan selaku Ketua BPD

Pendamping Desa menyatakan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban keuangan desa dilaksanakan via musyawarah desa. Dalam pertemuan tersebut, perangkat desa mempresentasikan laporan penggunaan anggaran secara detail. Ditekankan bahwa transparansi dalam penyampaian laporan sangat krusial untuk memberikan pemahaman menyeluruh bagi warga mengenai pemanfaatan dana desa..

“Kami konsisten menjaga keterbukaan dalam menyampaikan laporan keuangan desa kepada publik,” ujar Muhasim sebagai Pendamping Desa.

Menurutnya, transparansi ini merupakan fondasi penting untuk membangun dan memperkuat hubungan saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Laporan keuangan desa tidak hanya disampaikan melalui forum resmi, tetapi juga ditampilkan di berbagai media publik seperti papan informasi dan baliho agar mudah diakses oleh warga. Pendamping Desa menambahkan bahwa masyarakat

didorong untuk memberikan tanggapan dan saran terhadap laporan tersebut, menjadikan proses pelaporan sebagai kegiatan yang lebih partisipatif dan demokratis.

Menurut penjelasan Pendamping Desa, keterlibatan warga dalam proses pertanggungjawaban dana desa diwujudkan melalui forum musyawarah khusus. Dalam forum ini, masyarakat memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai alokasi dan pemanfaatan anggaran desa. Lebih lanjut, Pendamping Desa menegaskan bahwa laporan keuangan juga dipublikasikan secara terbuka melalui berbagai sarana informasi, termasuk papan pengumuman dan baliho, guna memastikan aksesibilitas informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Proses pelaporan Dana Desa sebenarnya sudah berjalan cukup terstruktur dengan adanya forum evaluasi triwulan yang melibatkan warga, BPD, dan pendamping desa. Dalam forum ini, laporan penggunaan dana disampaikan secara terbuka, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya, memberikan kritik, maupun masukan. Bahkan, laporan keuangan sering dipajang di papan pengumuman untuk memastikan akses informasi yang lebih luas.

Pengalaman warga seperti Ansori dan Cecep Herawan menunjukkan bahwa mereka merasa dihargai karena diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan jika menemukan ketidaksesuaian atau hal yang kurang jelas. Pendamping desa pun menegaskan pentingnya penyampaian laporan keuangan secara transparan melalui berbagai media seperti musyawarah desa, baliho, dan papan informasi untuk membangun kepercayaan masyarakat.

“Kami berupaya melatih perangkat desa membuat laporan sesuai standar, tetapi masih ada kesenjangan dengan pemahaman warga.”Ujar Muhasim selaku Pendamping Desa

Pendamping Desa, Muhasim, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Namun, ia mengakui masih terdapat kesenjangan pemahaman antara perangkat desa dan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun upaya pelatihan telah dilakukan, komunikasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa belum sepenuhnya efektif dalam menjembatani gap pengetahuan antara pemerintah desa dan warga.

“Warga tidak tahu cara mengakses dokumen lengkap. Hanya melihat ringkasan di papan pengumuman.”Ujar Supriyono selaku masyarakat

Di sisi lain, Supriyono sebagai perwakilan masyarakat menyatakan bahwa akses terhadap informasi rinci mengenai penggunaan dana desa masih terbatas. Warga hanya mendapatkan informasi singkat yang dipajang di papan pengumuman, tanpa bisa mengakses dokumen lengkap yang memuat detail pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya transparan dan partisipatif. Minimnya sosialisasi serta tidak adanya mekanisme penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami menjadi hambatan utama dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa.

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai upaya peningkatan kapasitas telah dilaksanakan, diperlukan strategi yang lebih terbuka dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar partisipasi warga dalam pengelolaan dana desa dapat lebih optimal. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah penyediaan akses informasi yang lebih luas serta program edukasi yang komprehensif, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa

Seringkali informasi dalam laporan dana desa terlalu teknis dan sulit dipahami, terutama bagi masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang administrasi. Penjelasan yang hanya berisi deretan angka tanpa dilengkapi dengan ilustrasi nyata seperti dokumentasi fisik pekerjaan atau foto progres membuat pemahaman menjadi terbatas. Padahal, transparansi yang sesungguhnya tidak hanya sekadar ketersediaan data, tetapi juga kemudahan pemahaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, diperlukan inovasi dalam penyajian laporan berupa infografis, video, atau bentuk visual lainnya agar lebih mudah dicerna.

Dalam hal pengawasan, meskipun sudah ada struktur resmi seperti BPD dan tim pengawas desa, pada praktiknya masih dirasakan sebagai formalitas belaka. Warga menginginkan sistem pengawasan yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif, tidak hanya sebatas prosedur administratif. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sosialisasi intensif, pelatihan pengawasan bagi warga, serta komunikasi yang lebih terbuka agar pengelolaan dana desa benar-benar efektif dan terhindar dari penyimpangan.

Dana Desa telah membawa berbagai kemajuan, mulai dari peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan saluran air hingga pelatihan kewirausahaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi warga. Sayangnya, distribusi manfaat belum merata, dengan beberapa program hanya menguntungkan segelintir orang. Oleh sebab itu, penting untuk menyusun perencanaan yang lebih partisipatif dan fokus pada sasaran yang tepat, sehingga kesejahteraan yang dihasilkan dapat dinikmati oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.

Masalah lain yang kerap ditemui adalah minimnya informasi mengenai jumlah alokasi dana desa tahunan. Walaupun data umum pernah dipublikasikan melalui papan pengumuman, penyampaiannya kurang rinci dan tidak dilakukan secara berkala. Padahal, hak masyarakat untuk mengetahui angka pasti merupakan wujud transparansi yang memungkinkan pengawasan mandiri oleh warga. Melalui sistem pengelolaan yang lebih terbuka, komprehensif, dan mudah dijangkau, diharapkan Dana Desa dapat optimal dimanfaatkan untuk pembangunan desa yang merata dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

## **5. Partisipasi Masyarakat dalam Pertanggungjawaban Dana Desa**

Proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam evaluasi. Pemerintah desa memaparkan laporan penggunaan anggaran kepada warga melalui forum musyawarah, yang menjadi sarana untuk memastikan akuntabilitas. Dalam forum tersebut, masyarakat berkesempatan memberikan masukan, saran, maupun

kritik konstruktif, sehingga pemerintah desa dapat melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan dana desa ke depannya.

Proses pertanggungjawaban menjadi pilar utama pengelolaan dana desa yang menunjukkan komitmen transparansi pemerintah desa. Forum pertanggungjawaban memberikan ruang bagi warga untuk mengkaji langsung relevansi program dengan kebutuhan mereka. BPD berfungsi sebagai pengawas yang memastikan prosedur berjalan tepat sekaligus mengecek implementasi pembangunan. Laporan disampaikan secara terbuka dalam pertemuan desa, mengundang partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi capaian program.

“Kita diminta menilai hasil pembangunan. Apakah sudah sesuai harapan atau belum.”Ujar Ansori selaku Masyarakat Desa Cilodang

Keterlibatan masyarakat dalam pertanggungjawaban dana desa tidak hanya terbatas pada proses administratif, tetapi juga mencakup pengawasan langsung terhadap hasil pembangunan yang telah direalisasikan. Warga berhak mengevaluasi apakah proyek-proyek yang didanai melalui anggaran desa benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka di lapangan.

Ansori Hidayat, salah seorang warga Desa Cilodang, mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban keuangan desa diwujudkan melalui forum musyawarah. Pada kesempatan tersebut, pemerintah desa menyampaikan laporan rinci mengenai penggunaan dana, sekaligus membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan masukan, pertanyaan, atau bahkan kritik konstruktif guna perbaikan di masa mendatang.

“Kami sangat menghargai kesempatan untuk memberikan saran setelah memeriksa laporan keuangan desa. Hal ini menumbuhkan keyakinan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara bertanggung jawab,” kata Ansori.

Ansori menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi laporan pertanggungjawaban membuat warga merasa dihormati.

“Proses ini memperkuat kepercayaan kami bahwa dana desa dimanfaatkan secara tepat guna,” ujarnya.

Selain ikut serta dalam pengawasan, masyarakat juga dilibatkan dalam menilai keberhasilan program-program yang sudah direalisasikan. Umpan balik dari warga menjadi bahan evaluasi berharga untuk perbaikan kebijakan ke depan. Menurut Ansori, keterlibatan ini tidak hanya memperkuat sistem pertanggungjawaban, tetapi juga menjamin keterbukaan dan kejelasan dalam pengelolaan dana desa.

“BPD pastikan pertanggungjawaban sesuai aturan, kami cek laporan dan hasil fisiknya.”Ujar Cecep Herawan selaku Ketua BPD

Ansori Hidayat, seorang warga Desa Cilodang, mengungkapkan bahwa masyarakat turut serta dalam proses akuntabilitas dana desa melalui forum musyawarah. Pada kesempatan tersebut, pemerintah desa menyajikan laporan rinci mengenai alokasi dan penggunaan anggaran, sekaligus membuka ruang dialog bagi warga untuk menyampaikan pendapat, saran, maupun evaluasi terkait pengelolaan dana tersebut.

Mekanisme pertanggungjawaban Dana Desa sebenarnya telah melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk musyawarah desa, peran aktif BPD, serta publikasi laporan melalui media seperti papan informasi dan grup WhatsApp. Namun, informasi yang disajikan kerap masih bersifat umum dan mengandung istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat awam. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan publik, diperlukan penyempurnaan format laporan dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan dilengkapi ilustrasi visual, sehingga semua warga - tanpa terkecuali - dapat dengan mudah memahami dan berpartisipasi aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran desa.

Dalam hal mekanisme pengawasan, meskipun telah ada struktur formal seperti BPD dan forum desa, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar melibatkan warga secara nyata.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis dan lisan dalam musyawarah, tetapi kehadiran warga rendah.”Ujar Rukminto selaku Kepala Desa

Menurut Rukminto selaku Kepala Desa, akuntabilitas penggunaan anggaran desa telah dipertanggungjawabkan melalui dua cara, yaitu secara dokumen tertulis dan presentasi lisan dalam forum musdes. Namun demikian, beliau menyayangkan minimnya antusiasme warga yang hadir dalam kegiatan pertanggungjawaban ini. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meski prosedur akuntabilitas telah berjalan sesuai ketentuan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih sangat terbatas. Beberapa penyebab yang mungkin melatarbelakangi hal ini antara lain sosialisasi yang kurang maksimal, pemahaman warga yang masih rendah tentang esensi musyawarah, atau mungkin adanya sikap skeptis terhadap proses pertanggungjawaban yang berlangsung.

“Ada ketidakpercayaan karena beberapa program tidak sesuai laporan. Misal, dana pembangunan jalan diklaim selesai 100%, tetapi di lapangan belum rampung.”Ujar Alam selaku masyarakat

Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat yang diwakili Alam, muncul ketidakpuasan terhadap validitas laporan yang disampaikan pemerintah desa. Sebagai bukti, Alam mencontohkan adanya disparitas antara klaim penyelesaian proyek jalan 100% dalam laporan dengan fakta di lokasi yang menunjukkan pekerjaan belum tuntas. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ketidaksesuaian antara dokumen resmi dengan kondisi sebenarnya berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dan melemahkan keterlibatan warga dalam proses pengawasan..

Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas yang berlaku sekarang belum mencapai hasil yang ideal. Kurangnya peran serta masyarakat

disertai perbedaan antara laporan dan pelaksanaan di lapangan menjadi kendala utama. Solusinya, penting untuk mengambil tindakan seperti menyajikan informasi secara lebih terbuka, menciptakan komunikasi dua arah yang baik dengan warga, serta melibatkan mereka langsung dalam memeriksa dan memvalidasi laporan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih andal.

Dari segi manfaat, Dana Desa telah memberikan kontribusi nyata melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase yang membantu memudahkan kehidupan warga. Namun demikian, distribusi manfaat belum sepenuhnya merata, karena masih terdapat program-program yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan. Selain itu, meskipun warga telah menyampaikan masukan-masukan, respons yang diberikan seringkali masih bersifat formal tanpa tindak lanjut yang konkret.

Di sisi transparansi pengawasan, meski telah ada payung hukum dan kerangka kerja yang jelas, dalam praktiknya keterlibatan warga masih terbatas. Penyampaian laporan juga kerap belum memenuhi standar keterbukaan dan kejelasan informasi, yang pada akhirnya membatasi peran masyarakat dalam proses pengawasan.

## **A. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa:**

### **1. Transparansi dan Sosialisasi**

Kepala Desa menegaskan bahwa pemerintah desa secara konsisten menjalankan prinsip transparansi dengan mempublikasikan rincian penggunaan anggaran desa melalui media seperti papan pengumuman dan baliho. Langkah ini dinilai efektif dalam membangun dan memelihara kepercayaan warga. Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah desa juga menjadi faktor penunjang yang signifikan dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka.

Pemerintah desa secara berkala menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tentang pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan pemahaman warga akan arti penting keterlibatan mereka. Melalui sosialisasi yang dilakukan secara konsisten ini, diharapkan masyarakat dapat menyadari peran aktif yang dapat mereka

mainkan dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran desa. Pemerintah desa bekerja keras untuk memberikan informasi mengenai penggunaan dana dan cara pengelolaannya dengan cara yang terbuka. Penggunaan media seperti baliho dan papan informasi sangat vital untuk memberitahukan masyarakat tentang rencana dan penggunaan dana.

Rukminto selaku Kepala Desa menegaskan komitmen pemerintah desa dalam menyebarluaskan informasi terkait alokasi dana desa secara transparan.

“Kami mengupayakan keterbukaan informasi melalui berbagai saluran, termasuk papan pengumuman dan baliho, sebagai upaya membangun kepercayaan warga terhadap kinerja pemerintah desa,” jelasnya.

Selain itu, kegiatan sosialisasi rutin yang diselenggarakan pemerintah desa berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta aktif mereka. Berbagai media informasi, termasuk baliho dan papan pengumuman, secara efektif digunakan untuk menyampaikan perkembangan program dan realisasi anggaran kepada seluruh warga.

“Sebagai warga, saya melihat bahwa laporan Dana Desa memang disampaikan secara terbuka melalui musyawarah, papan pengumuman, dan media sosial. Namun, informasi yang diberikan masih bersifat umum dan teknis, seperti tabel berisi angka dan istilah administratif, tanpa penjelasan sederhana tentang dampak nyatanya bagi masyarakat.” Ujar Lilis selaku masyarakat

Di sisi lain, musyawarah desa yang inklusif dan rutin menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara aktif. Proses ini membuat masyarakat merasa dilibatkan dalam menentukan prioritas pembangunan. Kepercayaan masyarakat akan semakin kuat ketika pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga warga merasa yakin bahwa anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pendamping desa memegang peran krusial untuk memastikan proses pengawasan dan penyadaran berjalan efektif. Dengan

demikian, masyarakat tidak hanya sekadar menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam memantau penggunaan dana desa.

“Laporan biasanya dipajang di papan pengumuman desa atau dibahas di musyawarah, tapi sering terlalu teknis. Saya berharap ada penjelasan lebih sederhana, misalnya pakai infografis.”Ujar Supriyono selaku masyarakat

Beberapa warga mengeluhkan bahwa cara pemerintah desa menyampaikan informasi masih memiliki beberapa kelemahan pokok. Menurut Supriyono, salah seorang warga, laporan desa seperti laporan keuangan atau perkembangan pembangunan sering kali ditempel di papan pengumuman atau dibahas dalam musyawarah, tetapi menggunakan bahasa yang terlalu rumit dan kurang dipahami masyarakat umum. Ia mengusulkan agar informasi disajikan lebih sederhana, misalnya dalam bentuk infografis, agar lebih mudah dimengerti. Hal ini menandakan bahwa meskipun informasi sudah disebarkan, penyampaiannya belum sesuai dengan kebutuhan warga yang tidak familiar dengan istilah-istilah birokratis.

“Kadang dapat info lewat grup WhatsApp, tapi cuma ringkasan. Tidak ada detail anggaran per proyek atau bukti fisik seperti foto progress pembangunan.”Ujar Lilis selaku masyarakat

Selain itu, Lilis mengungkapkan masalah lain, yaitu minimnya detail dalam informasi yang dibagikan melalui grup WhatsApp. Menurutnya, yang ia terima sering hanya berupa ringkasan tanpa penjelasan rinci tentang anggaran tiap proyek atau dokumentasi fisik seperti foto progres pembangunan. Kurangnya kejelasan ini menyulitkan warga dalam memantau pelaksanaan program secara transparan. Ketika informasi yang diberikan tidak lengkap, masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan dengan optimal, sehingga berisiko menurunkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah desa.

“Sosialisasinya kurang merata. Warga yang tidak aktif di musyawarah atau tidak punya smartphone sering ketinggalan informasi.”Ujar Sulistyowati selaku masyarakat

Sulistyowati juga menyoroti ketidakmerataan sosialisasi informasi di desanya. Warga yang tidak ikut serta dalam musyawarah atau tidak memiliki smartphone kerap tertinggal berita penting. Ini menunjukkan adanya kesenjangan

akses informasi, di mana hanya kelompok tertentu—seperti mereka yang aktif di kegiatan desa atau melek teknologi—yang mendapatkan informasi secara utuh. Sementara itu, kelompok rentan seperti lansia atau warga kurang mampu semakin terpinggirkan karena tidak terjangkau metode sosialisasi yang digunakan.

“Laporan ada di balai desa, tapi jarang diupdate. Warga juga tidak diajak diskusi untuk memastikan mereka paham.”Ujar Alam selaku masyarakat

Alam menambahkan bahwa meskipun laporan dapat diakses di balai desa, pembaruannya tidak dilakukan secara berkala, dan warga tidak dilibatkan dalam diskusi untuk memastikan pemahaman mereka. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program desa dapat mengurangi akuntabilitas pemerintah setempat. Jika informasi tidak diperbarui secara rutin dan tidak ada ruang dialog, warga akan kesulitan memberikan masukan atau menyampaikan aspirasi.

Dari berbagai keluhan ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas penyampaian informasi, baik dari segi format, kelengkapan data, maupun cara sosialisasi. Penggunaan infografis, pembaruan informasi secara teratur, kombinasi media digital dan konvensional, serta peningkatan partisipasi warga dalam musyawarah dapat menjadi solusi untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses informasi yang setara. Dengan demikian, transparansi dan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa dapat ditingkatkan, mendorong pembangunan yang lebih partisipatif dan inklusif.

## **2. Forum Musyawarah**

Sekretaris Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat merupakan upaya nyata untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam pengaturan keuangan desa. Forum konsultasi ini berfungsi sebagai sarana bagi penduduk untuk mengemukakan harapan dan keperluan mereka. Dengan adanya ruang diskusi yang bersifat terbuka dan melibatkan semua pihak, masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyuarakan pandangan serta tuntutan mereka secara lebih leluasa.

Ketua BPD Cecep Herawan menyatakan, “Musyawarah inklusif dengan melibatkan berbagai pihak merupakan langkah praktis untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal pengelolaan anggaran desa.”

Forum musyawarah yang bersifat terbuka dan melibatkan semua pihak memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspresikan harapan dan kepentingan mereka. Dengan demikian, masyarakat merasa diperhatikan dan turut berperan aktif dalam memutuskan prioritas pembangunan desa.

“Musyawarah lebih sering formalitas. Warga biasa seperti saya sulit menyampaikan usul karena didominasi perangkat desa atau tokoh tertentu.”Ujar Supriyono selaku masyarakat

Supriyono mengkritik musyawarah desa yang dianggapnya hanya bersifat formal. Ia menyatakan bahwa ruang bagi warga biasa untuk menyampaikan pendapat sangat terbatas karena diskusi lebih didominasi oleh perangkat desa atau tokoh tertentu. Akibatnya, aspirasi masyarakat umum seperti dirinya sering tidak didengar. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan partisipasi dan sentralisasi kekuasaan pada segelintir orang dalam pengambilan keputusan desa. Alih-alih menjadi sarana demokrasi inklusif, musyawarah kini sekadar rutinitas administratif.

“Jadwal musrenbang sering mendadak, banyak warga tidak tahu. Hasilnya juga jarang diumumkan ke publik.”Ujar Lilis selaku masyarakat

Lilis menyoroti masalah transparansi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia menilai jadwal musrenbang kerap ditentukan mendadak tanpa sosialisasi yang cukup, sehingga banyak warga tidak mendapat informasi dan absen. Lebih lanjut, hasil musrenbang jarang diumumkan secara terbuka, menyulitkan masyarakat melacak apakah usulan mereka diakomodasi. Minimnya keterbukaan ini berisiko menimbulkan ketidakpercayaan warga terhadap proses perencanaan pembangunan desa.

“Aspirasi disampaikan, tapi tidak ada feedback tindak lanjut. Misal, usulan perbaikan jalan di RT saya belum terealisasi 2 tahun.”Ujar Alam selaku masyarakat

Alam mengkritik ketiadaan realisasi dan umpan balik terhadap aspirasi warga. Ia memberi contoh usulan perbaikan jalan di RT-nya yang telah diajukan

dua tahun lalu namun tak kunjung ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan lemahnya respons pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat dan inefektivitas mekanisme partisipasi warga. Pengabaian berkelanjutan terhadap aspirasi berpotensi menurunkan motivasi warga berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga program desa berisiko tidak sesuai kebutuhan nyata.

### **3. Kepercayaan Masyarakat**

Pendamping Desa menyatakan bahwa transparansi dan kinerja baik pemerintah desa akan meningkatkan minat warga untuk terlibat aktif. Kepercayaan publik terhadap pemerintah desa merupakan pondasi utama untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mengawasi dana desa. Dalam hal ini, Pendamping Desa berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya peran serta mereka melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan.

“Ketika pemerintah desa bekerja secara transparan dan bertanggung jawab, masyarakat akan lebih bersemangat untuk terlibat,” ujar Muhasim, Pendamping Desa.

Beliau menjelaskan bahwa kepercayaan warga dibentuk melalui dua hal utama: keterbukaan dalam mengelola keuangan desa dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan dana.

“Ada kecurigaan karena beberapa proyek tidak jelas realisasinya. Misal, anggaran perbaikan jalan besar, tapi hasilnya tidak sesuai.” Ujar Sulistyowati selaku masyarakat

Sulistyowati mengemukakan adanya keraguan di kalangan masyarakat terkait implementasi sejumlah proyek pembangunan di desa. Ia menyoroti kasus nyata berupa pekerjaan perbaikan jalan yang menguras anggaran cukup besar, namun hasilnya tidak sebanding dengan dana yang telah dikeluarkan. Ketimpangan antara besaran anggaran dan kualitas hasil kerja ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penggunaan dana desa. Fenomena ini mengisyaratkan adanya kelemahan dalam aspek keterbukaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan proyek-proyek desa, yang berpotensi menggerus kepercayaan warga terhadap pemerintah

desa. Apabila kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan memicu kesenjangan hubungan antara masyarakat dengan perangkat desa.

“Saya percaya, tapi ingin laporan lebih rinci. Kalau ada bukti foto dan laporan keuangan detail, kepercayaan warga pasti meningkat.”Ujar Ansori selaku masyarakat

Ansori menyatakan bahwa meskipun pada dasarnya ia masih memiliki kepercayaan terhadap pemerintah desa, namun ia menginginkan laporan yang lebih rinci dan komprehensif mengenai pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Ia menekankan pentingnya bukti dokumentasi seperti foto progres pembangunan serta laporan keuangan yang detail sebagai bentuk pertanggungjawaban. Menurutnya, penyediaan bukti-bukti konkret semacam ini akan secara signifikan meningkatkan kepercayaan warga terhadap kinerja pemerintah desa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya bersikap kritis namun konstruktif, dan memiliki keinginan untuk turut serta mengawasi pembangunan desa asalkan diberikan akses informasi yang memadai.

Kedua pernyataan tersebut secara bersama menggarisbawahi esensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek desa. Sementara terdapat ketidakpercayaan akibat ketidakjelasan implementasi proyek, di sisi lain ada optimisme yang bersyarat pada adanya pertanggungjawaban yang nyata. Realitas ini menuntut perbaikan sistem pelaporan pemerintah desa melalui penyertaan dokumentasi visual dan detail finansial yang komprehensif. Langkah ini tidak hanya akan menjawab keraguan ala Sulistyowati tetapi juga memenuhi tuntutan akuntabilitas yang diharapkan Ansori. Pada hakikatnya, penyediaan informasi yang rinci dan terverifikasi ini akan menjadi pilar penguatan relasi antara warga dan pemerintah desa.

#### **4. Peran Aktif BPD dan Pendamping Desa**

BPD dan pendamping desa berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan edukasi serta menjamin transparansi pengelolaan dana desa. Menurut ketua BPD, kedua pihak ini memiliki peran krusial dalam mendorong keterlibatan warga. Salah satu tugas utama BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa,

termasuk memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

“Sebagai lembaga pengawas, BPD memiliki kewajiban untuk memantau pelaksanaan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dan memastikan alokasi dana sesuai dengan kesepakatan musyawarah,” tegas Cecep Herawan dalam kapasitasnya sebagai Ketua BPD.

Pendamping Desa memiliki peran krusial dalam menyosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai partisipasi aktif dalam pengelolaan dana desa. Mereka bertugas menjelaskan tata cara pengelolaan dana desa secara transparan serta mendorong keterlibatan warga dalam proses musyawarah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa.

“BPD ada, tapi kerja mereka tidak terlihat. Hasil pengawasan tidak pernah disosialisasikan ke warga.”Ujar Alam selaku masyarakat

Alam menyoroti ketidakefektifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasannya di tingkat desa. Keberadaan BPD secara formal tidak diimbangi dengan kontribusi nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam hal pengawasan. Masalah utamanya adalah kurangnya sosialisasi hasil pengawasan BPD kepada warga, sehingga menimbulkan kesan bahwa lembaga ini tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan untuk memastikan apakah BPD benar-benar melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Kurangnya transparansi informasi mengenai aktivitas BPD berpotensi melemahkan kontrol sosial masyarakat dan mengurangi akuntabilitas proses pengawasan di desa.

“Pendamping desa lebih aktif, tapi hanya saat ada pelatihan. Untuk pengawasan harian, kurang terlibat.”Ujar Supriyono selaku masyarakat

Supriyono mengamati bahwa peran pendamping desa cenderung bersifat situasional, di mana mereka hanya aktif dalam kegiatan tertentu seperti pelatihan, namun minim keterlibatan dalam pemantauan rutin program-program desa. Fenomena ini mengindikasikan pola pendampingan yang tidak berkelanjutan lebih

bersifat reaktif (hanya muncul saat ada agenda resmi) daripada proaktif dalam membina dan mengawasi proses pembangunan desa. Ketidakteraturan ini berpotensi mengurangi efektivitas pendampingan dalam penguatan kapasitas desa maupun optimalisasi pengawasan pembangunan.

## **B. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana**

### **Desa:**

#### **1. Kondisi Sosial-Ekonomi**

Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa ketika warga mengalami masalah finansial, prioritas utama mereka adalah memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga perhatian dan tenaga untuk terlibat dalam pengawasan dana desa menjadi berkurang. Kondisi ekonomi yang sulit ini turut menjadi penyebab rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

“Saat masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, mereka lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari dan tidak memiliki cukup waktu atau energi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.” ujar Rukminto selaku Kepala Desa

Kondisi sosial-ekonomi yang sulit membuat masyarakat lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar mereka daripada terlibat dalam kegiatan pengelolaan dana desa. Saat masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, mereka lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari dan tidak memiliki cukup waktu atau energi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

“Sebagai warga, saya melihat bahwa meskipun pemerintah desa telah menyampaikan laporan melalui musyawarah, papan pengumuman, dan media sosial, format laporan tersebut masih terlalu teknis dan sulit dipahami masyarakat awam. Akibatnya, banyak warga yang tidak paham bagaimana dana tersebut digunakan dan apa manfaatnya bagi mereka. Hal ini menurunkan minat mereka untuk terlibat dalam pengawasan.” Ujar Alam selaku masyarakat

Selain itu, rendahnya kesadaran akan pentingnya partisipasi juga menjadi kendala. Banyak warga merasa bahwa selama kebutuhan mereka terpenuhi, tidak

perlu repot-repot ikut mengawasi. Budaya individualistik semakin memperparah kondisi ini, karena warga cenderung tidak peduli dengan urusan bersama.

“Banyak warga sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu hadir di musyawarah desa. Mereka lebih fokus pada urusan ekonomi sehari-hari.”Ujar Sulistyowati selaku masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa seringkali terkendala oleh faktor ekonomi dan psikologis. Sebagian besar warga, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, lebih fokus pada upaya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka. Akibatnya, mereka sering tidak mampu meluangkan waktu untuk mengikuti proses musyawarah desa.

“Warga miskin sering enggan bersuara karena takut dianggap tidak tahu urusan atau khawatir dicap sebagai pengganggu.”Ujar Lilis selaku masyarakat

Keterbatasan ekonomi ini memaksa mereka berfokus pada urusan survival, mengesampingkan partisipasi sosial. Kombinasi antara tekanan ekonomi dan stigma sosial ini menciptakan lingkaran setan yang menyulitkan keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan. Akibatnya, pemerintah desa pun mengakui kesulitan praktis dalam melibatkan kelompok rentan ini, karena pemenuhan kebutuhan dasar seperti mencari nafkah tetap menjadi prioritas mutlak bagi mereka. Kondisi ini memperlebar kesenjangan partisipasi dan berpotensi membuat kebijakan desa kurang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat lapis bawah.

“Kami kesulitan melibatkan warga miskin dalam perencanaan karena mereka lebih memprioritaskan mencari nafkah.”Ujar Alam selaku masyarakat

Di sisi lain, warga miskin yang hadir pun sering enggan menyampaikan aspirasi karena kekhawatiran psikologis: takut dianggap tidak kompeten atau dicap sebagai pengganggu ketimbang partisipan konstruktif.

## **2. Kurangnya Kesadaran**

Menurut catatan Pendamping Desa, terdapat sebagian warga yang menganggap dana desa telah mencukupi kebutuhan mereka, sehingga membuat mereka kurang terdorong untuk ikut berpartisipasi. Hal ini diperparah oleh

minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam proses pengelolaan dana desa, yang kemudian menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

“Sebagian masyarakat merasa bahwa dana desa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga kurang termotivasi untuk berpartisipasi.”ujar Muhasim selaku Pendamping Desa

Kurangnya kesadaran ini membuat masyarakat cenderung hanya bergantung pada dana desa dan merasa tidak perlu untuk terlibat aktif dalam pengelolaannya. Beberapa masyarakat merasa bahwa dana desa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga kurang termotivasi untuk berpartisipasi. Sebagian masyarakat cenderung hanya bergantung pada dana desa dan merasa tidak perlu untuk terlibat aktif. Hal ini diakui oleh sekretaris desa yang mencatat bahwa sebagian warga belum sepenuhnya menyadari pentingnya peran mereka.

“Banyak warga berpikir Dana Desa adalah urusan pemerintah desa saja. Mereka tidak sadar itu uang mereka bersama.”Ujar Supriyono selaku masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan Dana Desa. Pertama, anggapan bahwa Dana Desa semata-mata urusan pemerintah desa menunjukkan pemahaman yang keliru di kalangan warga. Dana Desa sebenarnya merupakan anggaran publik yang bersumber dari APBN dan dikelola untuk kepentingan bersama, sehingga masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk terlibat dalam pengawasan. Namun, minimnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan banyak warga tidak menyadari bahwa mereka bisa dan seharusnya berperan aktif dalam memastikan dana tersebut digunakan secara transparan dan tepat sasaran

“Saya tidak terlalu paham cara mengawasi, yang penting ada jalan dibangun.”Ujar Ansori selaku masyarakat

Pernyataan “yang penting ada jalan dibangun” mencerminkan pola pikir efisien di kalangan masyarakat. Masyarakat cenderung menilai keberhasilan Dana Desa hanya dari aspek fisik yang kasatmata, seperti pembangunan infrastruktur, tanpa mempertanyakan proses penganggaran, kualitas pekerjaan, atau apakah dana

dialokasikan secara adil. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengawasan, seperti cara membaca laporan keuangan atau melacak progres proyek. Akibatnya, ruang untuk penyimpangan seperti mark-up anggaran atau proyek fiktif menjadi lebih terbuka.

“Budaya ‘nrimo’ (menerima apa adanya) membuat warga tidak kritis terhadap laporan keuangan.”Ujar Alam selaku masyarakat

Budaya nrimo (menerima apa adanya) memperparah kondisi ini. Sikap pasrah dan enggan bersikap kritis terhadap otoritas desa membuat warga tidak berani mempertanyakan ketidakjelasan dalam laporan keuangan atau kebijakan yang dirasa tidak berpihak. Budaya ini sering dimanfaatkan oleh oknum perangkat desa untuk menghindari akuntabilitas. Padahal, keterlibatan warga secara aktif seperti meminta penjelasan, melaporkan potensi penyalahgunaan, atau mengajukan usulan program memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan dan mampu merespon kebutuhan masyarakat. Partisipasi semacam ini justru menjadi kunci untuk membangun pemerintahan desa yang akuntabel dan bebas dari praktik koruptif.

### **3. Keterbatasan Akses Informasi**

Ansori Hidayat, salah satu warga Desa Cilodang, menyatakan bahwa meskipun ada sosialisasi, sebagian masyarakat masih kesulitan mengakses informasi terkait pengelolaan dana desa. Keterbatasan akses informasi ini menjadi penghambat partisipasi masyarakat.

“Meskipun ada sosialisasi, sebagian masyarakat masih kesulitan mengakses informasi terkait pengelolaan dana desa.”ujar Ansori Hidayat selaku masyarakat

Minimnya akses informasi menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya menyadari prosedur dan arti penting peran mereka dalam pengawasan dana desa. Kendati telah dilakukan berbagai upaya penyuluhan, tetap saja sebagian warga mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang jelas mengenai tata kelola anggaran desa.

“Laporan ada di balai desa, tapi formatnya teknis dan tidak ada penjelasan sederhana.”Ujar Sulistyowati selaku masyarakat

Meskipun laporan keuangan desa secara formal tersedia di balai desa atau papan pengumuman, format yang terlalu teknis penuh istilah administrasi, tabel rumit, dan tanpa penjelasan kontekstual menyulitkan warga biasa untuk memahami alokasi dan realisasi anggaran. Akibatnya, laporan tersebut hanya menjadi dokumen administratif yang terpajang, tetapi tidak benar-benar berfungsi sebagai alat pengawasan masyarakat.

“Kami sudah pasang papan pengumuman, tapi mungkin kurang sosialisasi.”Ujar Lilis selaku masyarakat

Selain itu, meskipun pemerintah desa telah memanfaatkan teknologi seperti grup WhatsApp untuk menyebarkan informasi, konten yang dibagikan seringkali terlalu singkat dan tidak mencantumkan rincian penting, seperti breakdown anggaran per proyek, bukti fisik pelaksanaan, atau perbandingan antara perencanaan dan realisasi. Hal ini membuat masyarakat kesulitan menilai apakah dana telah digunakan secara efektif.

“Info di WhatsApp hanya singkat, tidak ada rincian anggaran per proyek.”Ujar Ansori selaku masyarakat

Permasalahan ini semakin memburuk karena minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa. Hanya mengandalkan pemasangan papan informasi atau mengirim pesan melalui WhatsApp tidak akan efektif jika tidak ada tindakan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pesan tersebut benar-benar diterima dan dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. Sebagian warga, khususnya kelompok yang rentan seperti orang tua atau mereka yang tidak bisa baca-tulis, mungkin tidak tergabung dalam grup WhatsApp atau kesulitan memahami pengumuman di papan. Di samping itu, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut melalui pertemuan langsung atau media yang lebih mudah diakses (seperti audio atau visual), informasi yang disampaikan tetap tidak dapat dipahami dengan baik.

#### **4. Budaya Desa**

Ketua BPD menjelaskan bahwa budaya yang bersifat individualistis dapat menjadi penghambat partisipasi, sementara budaya yang mendukung kolaborasi dapat meningkatkan partisipasi. Di Desa Cilodang, budaya individualistis masih menjadi tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Budaya yang bersifat individualistis dapat menjadi penghambat partisipasi, sementara budaya yang mendukung kolaborasi dapat meningkatkan partisipasi.” ujar Cecep Herawan selaku Ketua BPD

Budaya individualistis membuat masyarakat cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, sehingga mengurangi partisipasi mereka dalam pengelolaan dana desa. Budaya yang bersifat individualistis dapat menjadi penghambat partisipasi, sementara budaya yang mendukung kolaborasi dapat meningkatkan partisipasi.

“Warga takut bersuara karena khawatir dianggap tidak sopan kepada perangkat desa.”

Salah satu penghambat utamanya adalah rasa takut warga untuk mengemukakan pendapat atau kritik terhadap perangkat desa karena khawatir dianggap tidak sopan.

“Ada kesan ‘ewuh pekewuh’ (sungkan) jika harus mempertanyakan kebijakan desa.”

Budaya ewuh pekewuh atau rasa segan yang sudah mengakar di kalangan masyarakat desa menjadi penghalang psikologis bagi warga untuk bersikap kritis, meskipun kebijakan yang dibuat langsung memengaruhi mereka.

“Saya pernah protes, tapi dianggap cari masalah. Akhirnya diam saja.”

Seperti terlihat dalam pernyataan terakhir, warga yang pernah mengkritik justru dijuluki "pembuat onar," sehingga menciptakan efek takut dan membuat mereka enggan bersuara di masa mendatang. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan yang besar antara perangkat desa sebagai pemegang wewenang dan masyarakat biasa.

### **5.3 Pembahasan**

Di Desa Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa mengalami perkembangan yang cukup berarti. Masyarakat dari berbagai kalangan turut serta dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pelaporan, pertanggungjawaban,

hingga pengawasan. Peran aktif warga ini sangat krusial guna memastikan alokasi dana desa tepat sasaran, hemat, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi yang tinggi tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata. Meskipun setiap tahap memiliki prosedur dan peran yang berbeda, semuanya saling berkaitan untuk menjamin pengelolaan dana desa sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat.

Prinsip transparansi menjadi landasan utama dalam menciptakan akuntabilitas, mendorong partisipasi warga, serta membangun kepercayaan terhadap kinerja pemerintah desa. Di Desa Cilodang, komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah, salah satunya dengan memajang informasi anggaran secara terbuka melalui baliho dan papan pengumuman yang memuat detail perencanaan dan realisasi penggunaan dana desa.

Dengan cara ini, warga dapat mengakses data keuangan secara langsung, sehingga mendorong partisipasi dan kepercayaan mereka dalam pembangunan desa. Selain itu, musyawarah desa menjadi forum penting untuk merumuskan kebutuhan dan prioritas penggunaan dana, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat desa, BPD, dan masyarakat umum.

Mekanisme ini tidak sekadar menjamin keterbukaan informasi, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat peran serta masyarakat dan praktik demokrasi di tingkat desa. Namun demikian, pelibatan warga dalam pengawasan Dana Desa masih menemui berbagai hambatan, utamanya dalam hal transparansi dan kemudahan memperoleh informasi. Kendati laporan pertanggungjawaban dana telah disebarluaskan melalui berbagai media seperti papan informasi di balai desa, grup WhatsApp, maupun forum musyawarah desa, penyajian datanya cenderung bersifat umum dan kurang mudah dipahami. Masyarakat seringkali terkendala dengan penggunaan istilah-istilah teknis, sementara detail penting seperti titik lokasi

pembangunan, besaran pekerjaan, maupun dokumentasi fisik jarang diuraikan secara gamblang. Di sisi lain, upaya sosialisasi laporan ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak sedikit warga yang sama sekali tidak mengetahui jadwal maupun tempat publikasi informasi tersebut.

Di sisi lain, meskipun ada mekanisme pengawasan formal melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan forum musyawarah warga, partisipasi aktif masyarakat masih rendah. Kondisi ini muncul akibat beberapa penyebab, di antaranya minimnya pemahaman masyarakat mengenai sistem pengelolaan keuangan desa, rasa enggan dianggap terlalu mencampuri urusan pemerintah desa, serta keraguan akan tanggapan yang akan diberikan oleh perangkat desa. Beberapa warga mungkin merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses pengelolaan dana, sementara yang lain khawatir dianggap terlalu ikut campur dalam urusan pemerintah desa. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap respons atau tindak lanjut dari pihak desa juga turut mengurangi motivasi masyarakat untuk terlibat aktif. Ketika warga memberikan masukan kritis, tanggapan dari pihak desa seringkali defensif dan tidak diikuti dengan tindak lanjut yang jelas. Akibatnya, proses pengawasan menjadi sekadar formalitas tanpa partisipasi yang bermakna.

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, diperlukan upaya yang lebih sistematis. Pertama, transparansi harus ditingkatkan dengan menyajikan laporan yang lebih rinci dan mudah dipahami, misalnya melalui infografis atau bahasa yang sederhana. Kedua, sosialisasi harus dilakukan secara proaktif melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, pertemuan rutin, atau bahkan kunjungan door-to-door untuk memastikan semua warga mendapatkan informasi. Ketiga, perlu ada pelatihan dasar bagi warga tentang pengelolaan keuangan desa agar mereka lebih percaya diri dalam memberikan masukan. Selain itu, mekanisme pengaduan harus dibuat lebih responsif, misalnya dengan menyediakan kotak saran, hotline, atau platform daring yang memudahkan warga menyampaikan kritik dan saran.

Upaya-upaya tersebut diharapkan tidak hanya mampu mendorong peningkatan partisipasi warga, tetapi juga menciptakan pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan dan terarah. Hasilnya, manfaat pembangunan dapat dinikmati

secara adil oleh seluruh masyarakat, menjadikan Dana Desa sebagai sarana efektif untuk meningkatkan taraf hidup warga desa secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan transparansi, pemerintah desa memasang papan informasi proyek di lokasi pembangunan, memungkinkan warga mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan memverifikasi kesesuaiannya dengan perencanaan. Mekanisme ini sekaligus berperan sebagai kontrol sosial guna meminimalisir potensi penyalahgunaan dana. Selain itu, pemerintah desa secara berkala mempresentasikan laporan pertanggungjawaban keuangan melalui forum musyawarah dan media publik, menunjukkan sikap terbuka sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik konstruktif.

Penyuluhan dan pembekalan pengetahuan kepada warga merupakan faktor kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan dan tata cara pengelolaan dana desa. Melalui upaya ini, masyarakat tidak sekadar menjadi pihak yang menikmati hasil pembangunan, melainkan juga dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan. Warga diberikan ruang untuk memantau pelaksanaan proyek, menyampaikan evaluasi, maupun melaporkan indikasi penyimpangan, sehingga pengelolaan anggaran dapat diawasi secara bersama-sama. Alokasi dana desa digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan seperti perbaikan infrastruktur, penyediaan air bersih, renovasi sarana ibadah, serta penguatan ekonomi masyarakat - semuanya mengacu pada dokumen perencanaan resmi seperti RKPDes dan APBDes yang bersifat terbuka untuk diakses publik.

Keberadaan BPD sebagai lembaga pengawas yang mandiri memegang peranan penting dalam menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Walaupun tidak turut serta dalam penyusunan anggaran, BPD berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa, menampung aspirasi warga, serta melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh langkah ini menunjukkan kesungguhan pemerintah desa dalam menerapkan prinsip tata kelola yang transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara etis maupun administratif untuk kesejahteraan bersama warga Desa Cilodang.

Kebutuhan masyarakat Desa Cilodang dengan mengamati adanya harapan dan aspirasi kolektif warga terhadap pembangunan yang menyentuh aspek-aspek mendasar dalam kehidupan mereka, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Salah satu kebutuhan paling mendesak yang diungkapkan oleh masyarakat adalah tersedianya Pembangunan fasilitas-fasilitas pokok termasuk jaringan jalan, konstruksi jembatan, serta penyediaan sarana air minum yang layak merupakan fokus utama pengembangan wilayah.

Prasarana-prasarana dasar ini menjadi tulang punggung untuk mendukung mobilitas warga dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pembangunan akses jalan dan jembatan yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, sementara penyediaan air bersih yang merata sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Semua infrastruktur dasar ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga desa. Infrastruktur ini dipandang sebagai fondasi penting yang menunjang kelancaran aktivitas ekonomi, mempermudah mobilitas penduduk, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan publik.

Kebutuhan ini muncul dengan jelas dalam forum-forum musyawarah desa, di mana warga menyampaikan usulan pembangunan fisik demi memperbaiki konektivitas antarwilayah dan mempermudah akses ke fasilitas vital lainnya. Selain itu, masyarakat juga menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, dua sektor yang tercantum dalam visi dan misi pembangunan desa. Harapan tersebut mencakup ketersediaan sarana belajar yang layak serta fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau, sehingga kebutuhan dasar warga, khususnya anak-anak dan lansia, dapat terpenuhi secara optimal tanpa harus keluar dari wilayah desa.

Di bidang ekonomi, masyarakat menaruh perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi lokal, terutama dengan mendorong penguatan sektor pertanian dan pengembangan kelembagaan ekonomi seperti koperasi. Langkah ini dipercaya mampu menggerakkan roda perekonomian desa sekaligus meningkatkan

pendapatan masyarakat secara konsisten. Inisiatif tersebut diiringi dengan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di tingkat lokal serta membangun kapasitas masyarakat dalam menjalankan usaha secara swadaya. Terkait pengaturan anggaran desa, terutama dalam hal alokasi dana desa, masyarakat menuntut penerapan prinsip keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap tahapannya.

Mereka berharap pengelolaan dana dilakukan secara terbuka, dengan informasi yang dapat diakses melalui papan pengumuman, baliho, atau forum musyawarah, agar seluruh alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat. Kejelasan informasi ini dianggap penting untuk menciptakan rasa percaya serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Warga Desa Cilodang tidak hanya berharap dapat berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan, tetapi juga menginginkan keterlibatan yang lebih besar dalam pelaksanaan program serta proses evaluasi hasilnya. Mereka berkeinginan untuk tidak sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang turut menentukan arah kebijakan dan memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Mereka mengharapkan aspirasi mereka benar-benar diperhitungkan dan tercermin dalam kebijakan desa yang diambil. Terkait hal ini, kebutuhan akan edukasi dan sosialisasi tentang mekanisme pengelolaan dana desa juga mencuat. Warga merasa perlu mendapatkan pemahaman menyeluruh agar mampu terlibat secara maksimal, baik sebagai pengawas maupun pelaksana kegiatan desa. Selain itu, masyarakat menuntut adanya ruang partisipatif yang inklusif, terutama untuk kelompok perempuan dan masyarakat marginal yang selama ini kurang terwakili. Mereka mendambakan forum-forum yang ramah dan setara, yang memberi peluang kepada semua golongan untuk menyampaikan pandangan tanpa rasa takut atau terkucilkan.

Kebersamaan juga menjadi elemen penting yang ingin dipertahankan dan diperkuat oleh masyarakat melalui budaya gotong royong dalam pembangunan desa. Warga berharap kegiatan pembangunan tidak hanya menjadi upaya fisik semata, tetapi juga menjadi momentum pemererat kerja sama sosial, memperkuat

ikatan antarwarga, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Kontribusi berupa tenaga, bahan makanan, maupun material secara swadaya dianggap sebagai wujud nyata dari nilai kebersamaan yang masih hidup di tengah masyarakat desa. Terakhir, masyarakat merasa perlunya adanya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan dana desa.

Evaluasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengukur efektivitas program, tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga menyampaikan masukan, menilai hasil capaian, dan bersama-sama menyusun langkah perbaikan ke depan. Dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan tersebut secara menyeluruh, diharapkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya pembangunan desa yang lebih efisien, inklusif, dan sejalan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

### **1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dana Desa**

Proses perencanaan Dana Desa di Desa Cilodang melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPD, perangkat desa, dan warga setempat. Forum ini berfungsi sebagai media dialog dimana masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dan kebutuhan pembangunan mereka. Melalui diskusi tersebut, warga berkontribusi memberikan ide dan rekomendasi untuk menetapkan skala prioritas pembangunan, yang kemudian dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) beserta rincian kegiatan dan anggarannya. Mekanisme partisipatif ini menjamin bahwa program-program pembangunan yang akan diimplementasikan benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pendamping Lokal Desa (PLD) turut berperan penting dalam memfasilitasi proses musyawarah dengan membantu masyarakat memahami tata cara perencanaan yang berlaku. Tugas PLD mencakup memberikan pemahaman tentang regulasi dan prosedur teknis agar partisipasi warga dapat berjalan optimal. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan ini memiliki nilai strategis untuk menjamin relevansi program dengan kebutuhan warga, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak pasif yang hanya menerima manfaat, melainkan sebagai pelaku utama dalam menetapkan agenda pembangunan desa.

Namun demikian, proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan Dana Desa masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan tingkat pemahaman warga yang belum merata serta keterbatasan akses terhadap informasi yang memadai. Kendala-kendala ini seringkali mengurangi efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

## **2. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dana Desa**

Dalam fase implementasi, warga Desa Cilodang menunjukkan keterlibatan nyata dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Salah satu wujud nyata partisipasi ini adalah dengan memberdayakan tenaga kerja setempat dalam proyek-proyek konstruksi. Kebijakan pemanfaatan tenaga lokal ini memberikan manfaat ganda: selain menekan biaya operasional dan menggerakkan perekonomian desa, juga menumbuhkan rasa memiliki yang kuat di kalangan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Keterlibatan langsung warga dalam proses pembangunan ini menciptakan kesadaran kolektif untuk menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun.

Pendamping Desa memegang peran kunci dalam memastikan pemahaman masyarakat tentang mekanisme pelaksanaan proyek, termasuk tata cara pengadaan barang/jasa dan penggunaan anggaran. Setiap proyek dikelola secara terbuka dengan melibatkan warga dalam seluruh prosesnya, menciptakan rasa dihargai yang pada akhirnya meningkatkan motivasi masyarakat untuk berkontribusi lebih aktif. Pemerintah desa memperkuat prinsip transparansi ini melalui pemasangan papan informasi yang memuat rincian jadwal dan spesifikasi pekerjaan, memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan langsung dan memberikan masukan konstruktif. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya mendorong akuntabilitas, tetapi juga menjamin kesesuaian pelaksanaan proyek dengan rencana awal dan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam pelaksanaan program Dana Desa, masyarakat seringkali tidak dilibatkan secara aktif, sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap prosesnya. Untuk mengatasi hal ini, warga perlu diberikan akses untuk memantau langsung pelaksanaan proyek, termasuk melihat lokasi, volume pekerjaan, dan bukti fisik pembangunan. Pembentukan tim pengawas independen yang melibatkan perwakilan warga dapat membantu memastikan transparansi di luar struktur formal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, aparat desa harus lebih responsif dalam menerima masukan dari masyarakat selama pelaksanaan proyek, tanpa menganggapnya sebagai bentuk intervensi yang tidak perlu.

### **3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaporan Dana Desa**

Pelaporan penggunaan dana desa merupakan langkah krusial guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa secara berkala mempublikasikan laporan realisasi dana desa kepada warga melalui beragam saluran, seperti papan informasi, baliho, maupun forum tatap muka. Upaya ini bertujuan memudahkan akses masyarakat terhadap data alokasi dan penyerapan anggaran, sehingga membangun hubungan saling percaya antara pemerintah desa dan warganya.

Di sisi lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut berperan dalam memverifikasi keakuratan laporan yang disampaikan, memastikan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan. Edukasi mengenai mekanisme pelaporan juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan kesadaran warga. Melalui dialog terbuka, pemerintah desa memaparkan tahapan pertanggungjawaban dana, mulai dari perencanaan hingga pelaporan akhir. Hal ini membantu masyarakat memahami alur pelaporan sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan dana desa.

Sebagai bentuk partisipasi aktif, warga Desa Cilodang diajak dalam proses evaluasi melalui forum triwulanan. Pada kesempatan tersebut, pemerintah desa menyajikan capaian penggunaan anggaran sekaligus membuka ruang masukan dan umpan balik dari masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan warga tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga berkontribusi dalam pengawasan dan penyempurnaan program desa.

Partisipasi masyarakat dalam pelaporan dana desa juga dilakukan melalui pengawasan terhadap laporan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Masyarakat dapat memberikan masukan dan koreksi jika ditemukan ketidaksesuaian dalam laporan tersebut. Dengan demikian, pelaporan dana desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pelaporan penggunaan Dana Desa seringkali bersifat formalitas dan sulit dipahami masyarakat karena disampaikan dalam bahasa yang teknis dan kurang rinci. Agar lebih transparan, laporan harus disajikan dalam bentuk yang mudah dicerna, seperti infografis atau penjelasan sederhana, termasuk detail lokasi proyek, foto progress, dan bukti pengeluaran. Sosialisasi laporan juga harus dilakukan secara merata melalui berbagai saluran, seperti media sosial, pertemuan warga, dan papan pengumuman, serta di waktu yang mudah diakses. Forum umpan balik khusus perlu diadakan untuk memberi kesempatan warga memberikan masukan sebelum laporan dianggap final, sehingga proses pelaporan tidak hanya sekadar formalitas belaka.

#### **4. Partisipasi Masyarakat Dalam Penatausahaan Dana Desa.**

Pengelolaan dana desa memerlukan sistem administrasi dan pencatatan keuangan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa secara berkala mempublikasikan laporan penggunaan anggaran kepada warga melalui berbagai saluran informasi, termasuk papan pengumuman dan media publik lainnya. Dengan menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap data alokasi dan penyerapan dana, pemerintah desa membangun hubungan saling percaya dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut berperan penting dalam memverifikasi keakuratan laporan pemerintah desa, memastikan kesesuaiannya dengan pelaksanaan di lapangan. Upaya sosialisasi mengenai tata kelola keuangan desa menjadi krusial untuk meningkatkan pemahaman warga. Melalui berbagai forum diskusi, pemerintah desa menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban dana mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Proses ini membantu masyarakat

memahami alur pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap kinerja pemerintah desa.

Di Desa Cilodang, masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan keuangan desa. Setiap pengeluaran dicatat secara rinci dan dapat diakses publik, sementara forum musyawarah desa menjadi wadah untuk membahas laporan keuangan. Melalui mekanisme ini, warga tidak hanya memahami penggunaan dana desa tetapi juga dapat memberikan masukan konstruktif. Keterlibatan aktif masyarakat ini menjadi pengawal penting dalam memastikan pengelolaan dana yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan warga.

Namun, pengelolaan keuangan desa masih sering dipandang sebagai domain eksklusif pemerintah desa, sehingga partisipasi masyarakat cenderung minim. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penyelenggaraan pelatihan dasar pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan literasi warga. Dokumen anggaran, realisasi, dan bukti transaksi harus terbuka untuk diakses publik (dengan tetap memperhatikan proteksi data sensitif). Inovasi teknologi seperti website desa atau aplikasi sederhana dapat menjadi solusi untuk memantau alur dana secara real-time. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak lagi menjadi pihak pasif, melainkan dapat berperan aktif dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### **5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pertanggungjawaban Dana Desa**

Proses pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam evaluasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan yang krusial untuk memverifikasi keakuratan laporan pemerintah desa serta memastikan kesesuaiannya dengan implementasi di lapangan. BPD secara aktif memantau pelaksanaan program dan mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Partisipasi masyarakat dalam mekanisme pertanggungjawaban diwujudkan melalui berbagai forum musyawarah, dimana warga didorong untuk berperan sebagai pengawas kritis terhadap alokasi dan penggunaan dana desa. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki yang lebih besar di kalangan masyarakat sekaligus memperkuat komitmen mereka terhadap hasil pembangunan. Sebagai bentuk akuntabilitas, pemerintah desa secara rutin mempresentasikan laporan

pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam forum-forum musyawarah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik terhadap laporan tersebut, sehingga pemerintah desa dapat memperbaiki kinerja pengelolaan dana desa di masa mendatang. Partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban dana desa juga dilakukan melalui pengawasan terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Masyarakat dapat menilai apakah proyek-proyek yang dibiayai oleh dana desa telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Dengan demikian, pertanggungjawaban dana desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi hasil pembangunan.

Agar pertanggungjawaban Dana Desa benar-benar akuntabel, masyarakat harus diberi ruang untuk memberikan pengawasan dan masukan. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses, seperti kotak saran fisik/daring, hotline, atau posko pengaduan, perlu disediakan agar warga dapat melaporkan dugaan penyimpangan. Pemerintah desa juga harus memberikan tanggapan terbuka terhadap setiap masukan dan melaporkan hasil pemeriksaan jika ada pengaduan. Sistem reward and punishment dapat diterapkan, misalnya dengan memberikan apresiasi kepada warga yang aktif mengawasi, sementara pihak desa yang tidak transparan harus dikenai sanksi. Dengan demikian, proses pertanggungjawaban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan kontrol sosial yang efektif.

#### **A. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat**

Keterlibatan warga dalam pengaturan dana desa dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat. Di antara faktor pendorong adalah kebijakan keterbukaan informasi yang dijalankan pemerintah desa melalui berbagai media publik seperti baliho dan papan informasi, yang berhasil meningkatkan kepercayaan publik. Mekanisme musyawarah desa yang terbuka dan partisipatif juga berperan penting sebagai sarana bagi warga untuk menyuarakan pendapat dan kebutuhan mereka, menciptakan rasa memiliki terhadap program pembangunan.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang terbentuk melalui praktik transparansi dan kinerja yang efektif, menjadi pendorong utama

meningkatnya partisipasi warga. Dukungan struktural dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta peran aktif pendamping desa dalam melakukan pengawasan, memberikan pemahaman, dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat juga berkontribusi signifikan dalam mengoptimalkan partisipasi warga.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan elemen penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Di Desa Cilodang, keterlibatan warga dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mendukung maupun menghambat. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pada dasarnya, ada beberapa aspek utama yang saling terkait dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Salah satu yang paling krusial adalah adanya transparansi dan sosialisasi yang dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan oleh pihak terkait.

Kedua, adanya forum musyawarah desa yang inklusif dan mampu menyerap aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa, yang dibangun melalui pengelolaan dana yang akuntabel. Keempat, peran aktif BPD dan pendamping desa tidak hanya memfasilitasi partisipasi warga tetapi juga melakukan pengawasan dan edukasi, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan paham mekanisme pengelolaan dana.

Kepala desa berupaya meningkatkan transparansi dengan menyebarkan informasi melalui papan pengumuman dan baliho, sebagai langkah membangun kepercayaan warga. Forum musyawarah juga menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, membuat mereka merasa dihargai dan berperan dalam pembangunan desa. Pendamping desa berperan dalam edukasi dan meningkatkan kepercayaan warga melalui sosialisasi, menunjukkan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Kepercayaan masyarakat semakin kuat jika laporan keuangan disampaikan secara rutin dan mudah diakses, baik melalui papan pengumuman, balai desa,

maupun media sosial dan grup WhatsApp. Dengan begitu, warga dapat memantau penggunaan dana untuk pembangunan, pemberdayaan, dan kegiatan sosial lainnya.

### **1. Transparansi dan Sosialisasi**

Keterbukaan dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu faktor penting yang meningkatkan partisipasi warga. Pemerintah desa berupaya menyampaikan informasi terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa secara jelas melalui berbagai cara, seperti pemasangan papan informasi, baliho, serta kegiatan sosialisasi tatap muka. Dengan memudahkan akses masyarakat terhadap data penggunaan anggaran, pemerintah desa membangun hubungan yang didasari kepercayaan dan akuntabilitas. Adanya transparansi ini memungkinkan warga untuk turut mengawasi alokasi dana desa, sehingga mereka yakin bahwa penggunaannya dilakukan secara efektif dan sesuai peruntukan.

Keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa menjadi syarat fundamental untuk menciptakan sistem pemerintahan desa yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan transparansi yang optimal dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan desa yang komprehensif, terbuka untuk umum, serta disusun dalam bentuk yang jelas dan mudah dimengerti oleh semua warga masyarakat. Papan pengumuman di balai desa, meskipun tradisional, tetap menjadi media penting untuk memajang laporan keuangan. Namun di era digital ini, pemerintah desa juga perlu memanfaatkan platform digital seperti website desa, grup WhatsApp, atau media sosial untuk memperluas jangkauan informasi. Sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan melalui berbagai pertemuan warga juga penting untuk memastikan pemahaman yang merata. Ketika informasi disampaikan secara terbuka dan berkala, masyarakat akan merasa dilibatkan dan kepercayaan terhadap pemerintah desa akan meningkat signifikan. Transparansi bukan hanya tentang memenuhi kewajiban administratif, tetapi lebih sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat sebagai pemilik sah Dana Desa.

Penyebaran informasi mengenai aturan dan tata cara pengelolaan dana desa juga memegang peranan krusial dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga. Melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat dapat memahami hak dan

kewajibannya dalam mengawasi penggunaan anggaran desa. Upaya ini tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Dengan pemahaman yang baik tentang mekanisme pengelolaan dana, warga akan lebih mampu berkontribusi secara konstruktif untuk kemajuan desa mereka. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, mereka menjadi lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Sosialisasi yang efektif juga membantu masyarakat memahami bahwa partisipasi mereka tidak hanya bermanfaat bagi desa secara keseluruhan, tetapi juga bagi diri mereka sendiri.

## **2. Forum Musyawarah**

Forum musyawarah dusun menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Musyawarah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan masyarakat umum. Melalui musyawarah, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga rencana pembangunan yang disusun benar-benar mencerminkan keinginan dan prioritas warga.

Forum musyawarah berfungsi lebih dari sekedar wadah diskusi, melainkan sebagai media untuk menghasilkan keputusan bersama yang menyertakan seluruh pihak, dimana setiap pendapat mendapat tempat dan pertimbangan. Melalui mekanisme ini, musyawarah berperan sebagai alat vital guna menjamin arah pembangunan desa selaras dengan aspirasi warga. Proses konsultasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat ini sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap setiap program pembangunan yang dihasilkan.

Forum musyawarah desa seharusnya menjadi ruang demokratis dimana seluruh komponen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan, dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Idealnya, forum ini tidak hanya diselenggarakan sebagai formalitas belaka, tetapi benar-benar menjadi sarana partisipasi masyarakat yang efektif. Proses musyawarah yang baik meliputi

tahap persiapan yang matang, penyampaian informasi yang lengkap sebelum musyawarah, metode diskusi yang inklusif, serta mekanisme pengambilan keputusan yang adil. Sayangnya, dalam praktiknya banyak musyawarah desa yang masih bersifat seremonial dengan partisipasi masyarakat yang pasif. Untuk mengoptimalkan fungsi forum ini, perlu dibangun kesadaran kritis masyarakat, memastikan keterwakilan semua kelompok, dan menciptakan atmosfer dialog yang setara antara pemerintah desa dengan warga.

Forum musyawarah yang efektif mampu melahirkan rencana pembangunan yang akurat dan responsif terhadap kebutuhan nyata warga. Ketika proses musyawarah dilakukan dengan baik, melibatkan seluruh unsur masyarakat, dan didasarkan pada data yang valid, maka hasilnya akan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa secara menyeluruh. Dengan demikian, program pembangunan yang dirumuskan tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga implementatif dan solutif bagi persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

### **3. Kepercayaan Masyarakat**

Keterlibatan aktif warga dalam pembangunan desa sangat bergantung pada tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran penting dalam menciptakan tata kelola dana desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa anggaran desa dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Keyakinan ini kemudian mendorong partisipasi warga dalam proses pengawasan maupun pengambilan kebijakan, karena mereka merasa kontribusinya benar-benar bermakna.

Kepercayaan publik yang terbangun merupakan aset berharga dalam pengelolaan Dana Desa. Ketika masyarakat yakin bahwa aspirasi mereka diperhatikan, kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan akan meningkat secara signifikan. Hal ini menciptakan siklus positif dimana transparansi melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan pada gilirannya

memperkuat partisipasi masyarakat. BPD sebagai lembaga perwakilan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan pelaksanaan program pemerintah desa, sekaligus menjaga kualitas penggunaan dana desa untuk kesejahteraan bersama.

Kepercayaan ini dibangun melalui konsistensi dalam transparansi, responsivitas terhadap keluhan warga, dan bukti nyata manfaat program yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika warga melihat bahwa setiap pertanyaan dan masukan mereka ditanggapi dengan serius, serta laporan keuangan disajikan dengan jujur dan terbuka, maka kepercayaan akan tumbuh secara organik. Kepercayaan juga diperkuat ketika hasil pembangunan dapat dilihat dan dirasakan langsung, seperti jalan yang diperbaiki dengan baik, program pelatihan yang benar-benar meningkatkan keterampilan warga, atau bantuan sosial yang tepat sasaran. Namun, kepercayaan ini sangat rapuh - sekali pemerintah desa melakukan kesalahan atau menutupi informasi, kepercayaan tersebut bisa hancur dan sulit dibangun kembali. Karena itu, menjaga kepercayaan masyarakat harus menjadi prioritas utama setiap perangkat desa.

#### **4. Peran Aktif BPD dan Pendamping Desa**

BPD dan PLD merupakan dua pilar penting dalam mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan desa. Sebagai lembaga perwakilan, BPD berfungsi sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, sekaligus memastikan berbagai masukan dan kebutuhan warga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan. Di sisi lain, PLD bertugas memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara pengelolaan anggaran desa, sehingga warga dapat berpartisipasi secara lebih efektif dan bermakna.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai wujud nyata keterwakilan masyarakat dalam struktur pemerintahan desa, dengan tugas utama meliputi fungsi legislasi, pengawasan, serta menampung dan menyalurkan aspirasi warga. Keberadaan BPD yang efektif akan menciptakan sinergi konstruktif antara

pemerintah desa dan masyarakat, sekaligus berperan sebagai mitra pengawas yang kritis. Agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal, anggota BPD harus memiliki kompetensi memadai dalam hal pengelolaan anggaran desa, memiliki keberanian menyampaikan aspirasi publik, serta bersikap netral dari berbagai kepentingan politik.

Di sisi lain, pendamping desa—baik yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten maupun berasal dari organisasi non-pemerintah—memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan teknis, memastikan kesesuaian perencanaan dan implementasi program dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan kemampuan aparat desa dan warga masyarakat. Kehadiran pendamping yang berkompeten mampu mendeteksi berbagai kendala secara dini dan memberikan alternatif penyelesaian yang tepat.

Melalui fasilitasi musyawarah dan pendampingan intensif, Pendamping Lokal Desa (PLD) menciptakan rasa nyaman dan dihargai bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Kolaborasi aktif antara BPD dan PLD ini membangun ekosistem yang mendorong partisipasi warga secara menyeluruh. Keduanya tidak sekadar membantu pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengelolaan dana desa, tetapi juga menjamin inklusivitas dengan memberikan ruang yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang selama ini termarjinalkan.

## **B. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat**

Beberapa kendala utama menghambat keterlibatan warga dalam pengelolaan Dana Desa. Faktor ekonomi menjadi penghalang paling signifikan, dimana tekanan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari menyita waktu dan tenaga masyarakat sehingga menyulitkan partisipasi aktif mereka. Realitas ini diperkuat oleh pernyataan sekretaris desa yang mengungkapkan bahwa ketika warga mengalami kesulitan keuangan, fokus utama mereka secara alami akan tertuju pada upaya memenuhi kebutuhan pokok keluarga daripada berpartisipasi dalam urusan pengelolaan dana desa.

Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam pengawasan dana desa. Sebagian warga menganggap bahwa dana tersebut

sudah cukup memenuhi kebutuhan mereka tanpa perlu partisipasi aktif. Pendamping desa juga mencatat bahwa banyak warga yang cenderung pasif karena merasa tidak perlu terlibat langsung.

Ketiga, akses informasi yang terbatas. Seperti diungkapkan oleh salah satu warga, meskipun ada sosialisasi, tidak semua masyarakat mudah memahami mekanisme pengelolaan dana desa. Informasi yang disampaikan seringkali sulit dijangkau atau terlalu teknis, sehingga menghambat pemahaman warga.

Keempat, budaya individualistik di desa. Ketua BPD menyatakan bahwa sebagian warga lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Sikap ini mengurangi semangat gotong royong dan kolaborasi dalam pengelolaan dana desa secara kolektif.

### **1. Kondisi Sosial Ekonomi**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi mereka. Pada kenyataannya, warga dari kalangan ekonomi lemah lebih memprioritaskan usaha memenuhi kebutuhan pokok keluarga dibandingkan keterlibatan dalam proses perencanaan atau pengawasan anggaran desa. Fenomena ini semakin terlihat jelas di desa-desa dengan karakteristik masyarakat yang beragam, dimana kelompok ekonomi bawah biasanya mendominasi. Keterbatasan finansial dan waktu yang mereka alami menyebabkan kontribusi dalam forum musyawarah desa menjadi sangat terbatas, sehingga menghambat terwujudnya pengelolaan dana desa yang benar-benar partisipatif.

Selain itu, ketergantungan pada bantuan sosial dan program pemerintah sering menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara warga dengan perangkat desa, dimana warga menjadi enggan untuk menyuarakan kritik atau ketidakpuasan karena khawatir akan mengganggu akses mereka terhadap bantuan. Fenomena ini diperparah oleh masih kuatnya budaya paternalistik di pedesaan, dimana masyarakat cenderung pasrah dan menerima begitu saja keputusan dari “atas”.

Mereka merasa bahwa partisipasi dalam musyawarah atau pengawasan tidak langsung memberikan manfaat ekonomi, sehingga mengurangi motivasi mereka

untuk terlibat aktif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk melihat manfaat langsung dari partisipasi mereka, misalnya melalui program-program yang memberikan dampak ekonomi nyata.

## **2. Kurangnya Kesadaran**

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai arti penting keterlibatan dalam pengelolaan dana desa turut menjadi kendala yang signifikan. Banyak warga yang belum sepenuhnya mengerti tata cara maupun nilai strategis dari partisipasi aktif tersebut. Persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat seringkali menganggap bahwa pengaturan anggaran desa semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tanpa melibatkan peran serta mereka. Minimnya kesadaran ini berdampak pada rendahnya antusiasme warga untuk terlibat dalam tahap perencanaan maupun pengawasan, karena dianggap tidak memberikan manfaat konkret secara langsung. Menyikapi kondisi ini, diperlukan upaya intensif dari pemerintah desa melalui program penyadaran dan pembinaan yang berkelanjutan, guna menanamkan pemahaman bahwa kontribusi aktif masyarakat merupakan faktor penentu kesuksesan pembangunan desa.

Meskipun pemerintah desa telah berupaya menyebarluaskan informasi melalui berbagai saluran, masih banyak warga yang mengalami kesulitan mengakses informasi tentang pengelolaan Dana Desa. Hambatan geografis membuat warga di pedusunan atau wilayah terpencil sulit mendapatkan informasi yang update. Tingkat pendidikan dan melek huruf yang rendah membuat banyak warga kesulitan memahami laporan keuangan yang bersifat teknis.

Keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan kepemilikan gawai pintar juga menyulitkan akses terhadap informasi digital. Akibatnya, informasi sering hanya beredar di kalangan elit desa atau mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan, sementara warga biasa tetap berada dalam ketidaktahuan. Kondisi

ini menciptakan kesenjangan informasi yang akhirnya melemahkan fungsi pengawasan masyarakat.

### **3. Keterbatasan Akses Informasi**

Meskipun pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, keterbatasan akses informasi masih menjadi masalah. Sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, kesulitan mengakses informasi tentang alokasi dan penggunaan dana desa. Tidak semua warga bisa datang ke balai desa atau membaca papan pengumuman, sehingga mereka kurang memahami proses pengelolaan dana desa. Keterbatasan ini mengurangi partisipasi mereka, karena mereka tidak memiliki informasi yang cukup untuk terlibat secara efektif. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa perlu menggunakan media yang lebih inklusif, seperti media sosial atau penyebaran informasi melalui tokoh masyarakat, sehingga informasi dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

### **4. Budaya Desa**

Budaya desa yang masih kental dengan hierarki sosial juga menjadi faktor penghambat. Sebagian masyarakat merasa tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi mereka, terutama jika mereka berasal dari kalangan yang dianggap biasa atau rendah. Mereka merasa tidak pantas untuk berbicara di depan tokoh masyarakat atau perangkat desa, sehingga menghambat terciptanya partisipasi yang inklusif dan demokratis. Budaya ini perlu diatasi agar semua lapisan masyarakat dapat terlibat secara setara dalam proses pembangunan. Pemerintah desa perlu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mendorong partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat, tanpa memandang status sosial.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang mengurangi partisipasi masyarakat. Kondisi sosial-ekonomi yang sulit membuat masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar daripada terlibat dalam pengelolaan dana desa. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dan mekanisme pengelolaan dana desa juga menjadi kendala. Keterbatasan akses informasi, meskipun ada sosialisasi, membuat masyarakat kurang memahami cara terlibat dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, budaya individualistis yang masih kuat di

beberapa desa, seperti di Desa Cilodang, membuat masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, sehingga mengurangi rasa tanggung jawab terhadap pembangunan desa.

Budaya masyarakat pedesaan yang cenderung menghormati hierarki dan menghindari konflik menjadi tantangan serius dalam menciptakan tata kelola Dana Desa yang partisipatif. Masyarakat desa umumnya memiliki rasa sungkan yang tinggi terhadap pemimpin dan otoritas desa, sehingga enggan menyampaikan pendapat yang berseberangan atau mengkritik kebijakan. Tradisi musyawarah untuk mufakat seringkali dimaknai sebagai penyeragaman pendapat dan penekanan terhadap perbedaan pandangan. Selain itu, ada kekhawatiran akan dampak sosial bagi warga yang vokal menyampaikan kritik, mulai dari dikucilkan secara sosial hingga kehilangan akses terhadap program bantuan. Budaya ini diperkuat oleh sistem hubungan patron-klien yang masih kuat di banyak desa, dimana loyalitas dan kepatuhan lebih dihargai daripada sikap kritis. Akibatnya, kontrol masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa menjadi sangat lemah.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme penganggaran desa dan teknik pengawasan keuangan menjadi penghambat utama partisipasi masyarakat yang bermakna. Banyak warga yang tidak memahami dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMDes, RKPDes, atau APBDes, sehingga sulit bagi mereka untuk menilai apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan. Ketidapahaman tentang standar harga satuan pekerjaan membuat masyarakat tidak bisa mengevaluasi apakah suatu proyek dibangun dengan harga yang wajar. Minimnya pengetahuan tentang hak-hak masyarakat dalam pengawasan juga membuat warga tidak tahu bagaimana harus bersikap ketika menemukan indikasi penyimpangan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal pengawasan. Akibatnya, pengawasan Dana Desa seringkali hanya dilakukan oleh segelintir orang yang dianggap memiliki kapasitas, sementara mayoritas warga tetap pasif.